

Nomor : B/238/RB.06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tahun 2024**

25 April 2025

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran "Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif" serta "Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional". Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 adalah **62,23** dengan kategori "**B**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	55,83	55,7
B	RB Tematik	20	10,2	6,53
C	Indeks RB	120	66,03	62,23
			B	B

Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan penurunan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250423LNKV



Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Bupati Barito Selatan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250423LNKV



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan - LKE KEMENPANRB

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.5	1.5	Beberapa Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional belum ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024). Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.- Beberapa Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional belum ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi. - Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan. - Rencana aksi yang disusun belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama.. Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran.. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.	Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024). Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.- Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. - Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama. - Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama.. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran.. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	0	0		
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	3	1.8		Segera terapkan tim kerja sebagai implementasi dari peraturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.03	2.42	<p>1. Penetapan Tujuan a. Sasaran Strategis Pemda telah tepat dan baik, namun masih terdapat target kinerja yang belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya b. Sasaran Strategis OPD belum seluruhnya mempunyai keterkaitan dengan sasaran strategis Pemda, dan masih terdapat Sasaran Strategis OPD yang overlapping dengan Sasaran Strategis Pemda. Selain itu terdapat indikator kinerja yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak cukup menggambarkan sasaran, serta target indikator yang tidak memenuhi kriteria SMART c. Sasaran program yang overlapping dengan sasaran strategis OPD, dan sasaran yang tidak berorientasi pada hasil, indikator kinerja program yang overlapping dengan indikator sasaran strategis Pemda, dan indikator yang tidak spesifik dan relevan untuk menggambarkan target pencapaian sasaran d. Sasaran kegiatan yang overlapping dengan sasaran strategis OPD, dan sasaran yang tidak berorientasi pada hasil, indikator kinerja kegiatan yang tidak spesifik dan relevan serta tidak berorientasi pada hasil dan target indikator kegiatan tidak memenuhi kriteria SMART e. Sasaran sub kegiatan yang overlapping dengan sasaran kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan yang tidak spesifik dan relevan serta tidak berorientasi pada hasil, dan target indikator yang tidak memenuhi kriteria SMART dan tidak proyektif 2. Struktur Proses a. Manajemen risiko belum diterapkan sebagai indikator kinerja b. Belum seluruh pegawai yang memiliki kesadaran terkait manajemen risiko c. Risiko kemitraan belum diidentifikasi baik tingkat Pemda maupun tingkat OPD d. Kualitas identifikasi risiko belum sepenuhnya memadai dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan strategis e. Risiko belum</p>	<p>1. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan pendampingan/asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan; 2. Menginstruksikan kepada Inspektur meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan Perangkat Daerah; 3. Melakukan penajaman perencanaan terkait pohon kinerja (cascading) dan sinergi/kolaborasi program antar perangkat daerah (cross cutting program) dengan menggunakan kerangka logis dan didukung dengan sasaran dan indikator kinerja yang tidak overlapping antar sasaran/program/kegiatan, berorientasi pada hasil, memenuhi kriteria SMART, serta target yang tepat; 4. Meningkatkan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan: a. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah; b. Menetapkan manajemen risiko sebagai indikator kinerja; c. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko; d. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko fraud pada seluruh proses bisnis; e. Melakukan reviu dan evaluasi implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat; f. Mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan mengevaluasi secara berkala sehingga dapat efektif menurunkan level risiko, dan dapat mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab; g. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan: 1) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi</p>

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							<p>diidentifikasi secara memadai, tidak seluruh risiko yang telah diidentifikasi dilakukan analisis risiko dan evaluasi risiko, pemantauan implementasi rencana tindak pengendalian (RTP) belum dilakukan, dan evaluasi eektivitas RTP dalam mengurangi dampak/menghilangkan penyebab dan menurunkan level risiko belum dilakukan f. Belum seluruh OPD mengkomunikasikan risiko dan RTP kepada seluruh pihak g. Proses manajemen risiko belum dilakukan monitoring secara memadai meliputi monitoring atas implementasi pengendalian, keterjadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan), dan pemantauan setiap tahapan pengelolaan risiko h. Proses manajemen risiko belum dilakukan evaluasi independen oleh APIP 3. Pencapaian Tujuan a. Sasaran strategis OPD overlapping antar sasaran/program/kegiatan, Indikator tidak cukup menggambarkan sasaran, dan capaian atas target kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan b. Opini WTP namun masih terdapat temuan berulang terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum sesuai ketentuan. c. Opini WTP namun masih terdapat catatan terkait aset d. Opini WTP namun masih terdapat temuan ketidakpatuhan yang jumlahnya lebih dari 5</p> <p>dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon; 2) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutnya pengaduan. 5. Meningkatkan tata kelola sektor strategis pemerintah daerah dengan: a. Menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam mendukung sektor kemiskinan; b. Melakukan internalisasi atas tugas dan wewenang masing-masing perangkat daerah. 6. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang; 7. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.</p>	
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.5	0	0		
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	61.02	2.44	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
7	RB General	Capaian	Tingkat	2.5	27.14	0.68	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Digitalisasi Arsip				dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi	arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	2	1	Belum menyusun renaksi, jumlah laporan di LAPOR! masih sedikit, Masih terdapat laporan yang belum ditidakanjuti , rata-rata waktu respon masih lama	Perlu menyusun renaksi, mempromosikan kanal aduan, menyelesaikan aduan, mempercepat tindaklanjut
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	46.47	1.16	1. Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik belum terbukti dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik yang dimiliki; 2. Pengungkapan bukti dukung masih sangat kurang sesuai/memadai.	1. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. 2. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain: a. Memperkuat dukungan pengkajian/analisis/ telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan; b. Memperkuat partisipasi stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan; c. Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran dalam seluruh proses kebijakan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan. e. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan.
10	RB General	Capaian	Indeks	2.5				

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Reformasi Hukum					
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.79	1.4	<p>• Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, penerapan aspek metadata statistik telah mencapai predikat sangat baik. Hal ini dicapai berkat adanya pelaporan yang sistematis mengenai kegiatan metadata dari setiap kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh produsen data. Selain itu, tersedianya dokumen kebijakan berupa pedoman penyelenggaraan statistik sektoral memberikan kerangka kerja yang jelas bagi semua pihak terkait. Pedoman ini mengatur bahwa setiap kegiatan statistik harus dilakukan reviu secara berkala, baik selama kegiatan berlangsung maupun setelah selesai, sehingga memastikan kualitas dan relevansi data yang dihasilkan. • Penerapan kode referensi dalam kegiatan statistik sektoral juga telah mencapai predikat sangat baik. Setiap produsen data di Kabupaten Barito Selatan telah menerapkan kode referensi yang diatur dalam buku pedoman penyelenggaraan statistik sektoral. Bukti dukung yang disampaikan menunjukkan bahwa kegiatan statistik yang menerapkan kode referensi telah dilakukan reviu secara berkala oleh walidata, yang memastikan bahwa data yang dihasilkan konsisten dan dapat diandalkan. • Meskipun ada kemajuan dalam penerapan aspek metadata dan kode referensi, penerapan Standar Data Statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih memperoleh predikat kurang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih terdapat beberapa produsen data yang belum sepenuhnya menerapkan standar data statistik yang sesuai dengan pedoman yang</p>	<p>• Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Standar Data Statistik (SDS) oleh seluruh produsen data, serta memberikan pelatihan dan dukungan untuk memastikan bahwa semua produsen data dapat menerapkan standar yang ditetapkan. • Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus membangun infrastruktur untuk mendukung interoperabilitas data, termasuk pengembangan sistem yang memungkinkan pertukaran data antar produsen data secara efisien dan efektif. • Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu menyusun dan menerapkan pedoman yang jelas untuk penilaian akurasi data, serta melakukan pelatihan bagi produsen data untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan penilaian akurasi yang sesuai dan terdokumentasi dengan baik.</p>

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							<p>telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan dalam rapat penyelenggaraan statistik sektoral menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dan ketidakakuratan dalam data yang dihasilkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan aspek interoperabilitas data juga masih berada pada predikat kurang. Interoperabilitas data yang belum diterapkan secara menyeluruh oleh semua produsen data menghambat kemampuan untuk berbagi dan menggunakan data secara efisien. Tanpa adanya sistem yang memungkinkan pertukaran data yang lancar antar lembaga, potensi pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik menjadi terhambat. • Penerapan aspek akurasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih berada pada predikat kurang. Belum terdapat bukti dukung yang menunjukkan bahwa masing-masing produsen data telah melakukan kegiatan penilaian akurasi data. Tanpa adanya penilaian yang sistematis terhadap akurasi data, risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan berbasis data meningkat, yang dapat berdampak negatif pada kebijakan dan program yang dijalankan. 	
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	83.44	2.09	<p>1) Pengumuman RUP di atas 70%; 2) Realisasi e-Tendering di atas 70%; 3) Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%; 4) Tidak ada transaksi Toko Daring; 5) Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di bawah 50%; 6) Pencatatan e-Kontrak di bawah 20%; 7) Keterisian JF PPBJ belum memenuhi 100% namun sudah di atas 60%; 8) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif).</p>	<p>1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP; 2) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; 3) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan; 4) Realisasikan minimal 1 paket melalui toko daring; 5) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket non-tender/non e-purchasing sesuai RUP; 6) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak; 7)</p>

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
								<p>Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain; 8)</p> <p>Implementasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya.</p>
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	157	1.53	2023	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2	2.61	1.04		
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	75.46	1.51		Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
16	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3.2	5.76	Predikat Baik	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	4	91.73	3.67	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Penganggutan Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini	
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	86.67	3.17	Masih terdapat Indikator Kinerja Utama (Non Makro) yang belum berhasil memperoleh capaian kinerja lebih dari 90% (>90%) dari target yang diperjanjikan. Terdapat 4 indikator dari 30 indikator kinerja utama yang tidak memenuhi kriteria capaian kinerja lebih dari 90%.	Mengawal ketercapaian seluruh indikator kinerja utama agar tercapai sesuai dengan target yang telah diperjanjikan.

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5	WTP	
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	78.18	3.13		
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	63.6	2.54	Kategori Cukup Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	66.01	6.6	Internal: 68.53; Eksternal: 86.31; Eksper: 69.66	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapat skor SPI sebesar 66.01. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/ kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
23	RB General	Capaian Sasaran	Survei Kepuasan Masyarakat	8	84.55	6.76		Pertahankan Pelaksanaan SKM, Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Strategis Reformasi Birokrasi						Pelayanan Publik
24	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0.27	0.27		
25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0.23	0.23		
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0	0		
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0.4	0.4		
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0.32	0.32		
29	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.35	1.35	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2024, sumber data BPS	
30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1	1	Data Realisasi Investasi Menggunakan Data Per Desember 2024	
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus	3	0	0	Tidak Menyusun Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
			Penanganan Stunting (Capaian Dampak)					
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.96	2.96	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2098	
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum ideal	
34	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	1	0.5	Instansi sudah menyusun Arsitektur SPBE As-Is sesuai standar	Instansi perlu menyusun Arsitektur To-Be